

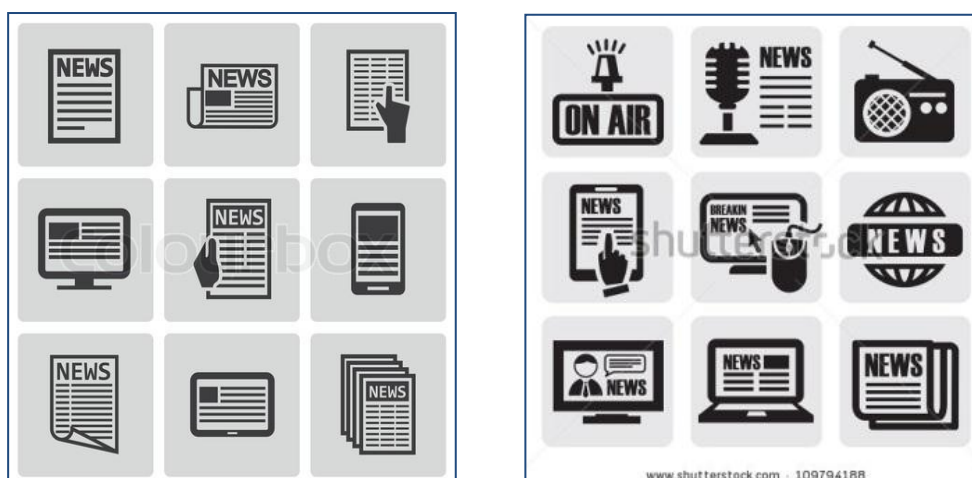


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Jumat, 12 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. ANGKASA PURA HAPUS AIRPORT TAX (*Media Online Media Indonesia*)
2. PRESIDEN TERBITKAN PERPRES TOL SUMATERA (*Media Online Indonesia Finance Today*)



**MEDIA
INDONESIA** 4
REPUBLIK
PERUBAHAN

Marian Umam
Media Indonesia

Midoboo



Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5021902
No. Bebas Pulu: 0800180808
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Jumat, 12 September 2014

Halaman 19, Kolom 2-5

Angkasa Pura Hapus Airport Tax

Aturan ini mempercepat proses *check in* penumpang pesawat di bandara.

RIZKY NOOR ALAM

DUA BUMN pengelola bandara, PT Angkasa Pura I (persero) dan PT Angkasa Pura II (persero), akan menghapus pajak bandara (*airport tax*) di bandara seluruh Indonesia. Dengan demikian, penumpang tidak perlu lagi membayar tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) di bandara.

Namun, biaya tersebut akan dibebankan ke dalam tiket pesawat, atau *passenger service charge (PSC) on ticket*. Saat ini, *PSC on ticket* baru diimplementasikan oleh maskapai Garuda Indonesia dan anak usahanya, Citilink.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri Sunoko, menyatakan aturan *PSC on ticket* itu sedang diproses lebih lanjut lantaran memerlukan koordinasi dengan maskapai penerbangan.

"*Airport tax on ticket* sedang diproses lebih lanjut dan perlu koordinasi dengan maskapai, dan perlu disiapkan sistem aturannya. Itu juga baru keluar," ujar Tri melalui pesan singkat kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Saat dihubungi secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Djoko Murdijatmo menegaskan bahwa aturan tersebut memang sudah dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Udara. "(Aturan) sudah dikeluarkan dirjen untuk penggabungan (*PSC on ticket*), perumusannya juga sudah lama," jelas Djoko.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan pengaturan selanjutnya mengenai instruksi tersebut diserahkan sepenuhnya ke PT Angkasa Pura I dan II.

PJP2U atau *PSC* adalah tarif yang dikenakan pengelola bandara kepada penumpang atas ketersediaan fasilitas dan pelayanan saat di bandara.

Perubahan kebijakan itu dilakukan mengingat banyaknya keluhan dari calon penumpang akan pungutan-pungutan yang harus dibayar oleh calon penumpang pesawat dari bandara Indonesia.

"(Aturan) sudah dikeluarkan dirjen untuk penggabungan (*PSC on ticket*)"

Djoko Murdijatmo

Direktur Angkutan Udara Kemenhub

Apalagi dunia penerbangan internasional sudah menerapkan *PSC tax on ticket* sehingga tidak memberatkan para calon penumpang. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, bandara-bandara yang berada di bawah pengelolaan swasta juga wajib menerapkan hal serupa. Aturan itu juga mempercepat proses *check in* penumpang di bandara.

Perlu pengaturan

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha mengatakan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, perlu prasarana dan sistem pengaturan.

"Saya belum tahu pengaturannya nanti bagaimana, mungkin akan digabung (ke tiket). Secara prinsip, itu boleh tapi akan diatur," jelasnya.

Kendati demikian, ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima peraturan pengalihan *airport tax* tersebut.

"Saya belum terima aturan itu, nanti saya cek. Yang pasti AP I mendukung aturan pemerintah," imbuh Farid.

Hal yang sama diungkapkan oleh Corporate Secretary Air Asia Indonesia, Audrey Progestama Petrinny. Ketika dihubungi, ia mengaku belum mengetahui isi dari aturan tersebut.

"Saya terus terang belum terima notifikasi resmi dari Kementerian Perhubungan. Jadi kami belum dapat info soal aturan itu, jadi saya belum bisa berkomentar," ungkap Audrey.

Audrey menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkomentar soal aturan pascasosialisasi aturan itu sampai ke pihaknya dan dikaji secara internal.

Sebelumnya, maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia, menerapkan *PSC on ticket* mulai Oktober 2012. Anak usahanya yang menyediakan jasa penerbangan berbiaya murah, Citilink, menyusul menerapkan kebijakan itu pada Januari 2014. (Riz/E-6)

rizkynoor@mediaindonesia.com

Aturan ini mempercepat proses check-in penumpang pesawat di bandara. Aturan yang dikeluarkan diejen untuk penggabungan PSC On Ticket

Hashtag Berita :

#PelayananUmum #Sarana&Prasarana #PT.AngkasaPura

PRESIDEN TERBITKAN PERPRES TOL SUMATERA



subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Jumat, 12 September 2014

Halaman 1, Kolom 1-6



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Rapat dengan agenda yang berkaitan dengan bidang perekonomian yang mesti dituntaskan dalam waktu satu setengah bulan terakhir serta implementasi dari sejumlah kebijakan dan program yang teresak.

Presiden Terbitkan Perpres Tol Sumatera

Pemerintah menyetujui PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan tol Sumatera.

Direp Malik

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Presiden (perpres) tentang pembangunan empat ruas jalan tol

trans Sumatera. Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan perpres tersebut menyetujui PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol tersebut. Presiden juga menyetujui

disepakati pembakuan semua opsi pembiayaan. PT Hutama Karya tidak harus mendapatkan Privyotasi Modal Negara (PMN) atau pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, melainkan bisa berasal dari pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi dan pinjaman multilateral.

"Prioritas pembangunan empat ruas tol itu ada dua, yaitu ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Menurut rencana, *ground breaking* dilaksanakan Oktober 2014, ujar Chairul Tanjung, usai sidang kabinet terbatas, Kamis.

Chairul mengungkapkan, dalam perpres juga disebutkan jangka waktu PT Hutama Karya menyelesaikan empat ruas tol trans Sumatera. Apabila jangka waktu tersebut terlambat, proyek tersebut akan diserahkan kepada pihak lain untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

"Untuk jangka waktu memang masih didiskusikan berapa lama, namun biasanya dalam pembangunan jalan tol makan waktu 12-18 bulan dan bila itu melewati tenggat waktu, akan diberikan kepada BUMN karya lain yang sahamnya 100% milik pemerintah karena ini bersifat pengisian," tegasnya.

Adapun empat ruas tol trans Sumatera yang diberikan kepada PT Hutama Karya untuk dikerjakan adalah ruas tol dari Bakaabeh-Lampung, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Kamili-Dumai, dan Medan-Sialangama-Tebing Tinggi. Empat ruas tersebut memiliki total kebutuhan investasi Rp 31,5 triliun.

Jalur KA

Sementara itu, EE Mangindaan, Menteri Perhubungan, mengatakan pembangunan jalan tol trans Sumatera ke depannya juga diintegrasikan dengan pembangunan jalur kereta api (KA) yang menggunakan sisa tanah di samping ruas tol yang ditunjuk. Jalur tersebut juga akan menghubungkan Bandar Lampung hingga Banda Aceh.

Menurut dia, ide pembangunan kereta api di samping jalan tol trans Sumatera akan mengurangi biaya pengalihan lahan. Nantinya, jalur dibangun dengan *single track* dan *double track* di daerah tertentu untuk mengurangi kepadatan. Ide ini diharapkan dapat dilaksanakan bersama dengan empat ruas tol yang ada.

"Atas putusan ini pemerintah pusat mengharapkan para gubernur di setiap provinsi yang dilintasi tol trans Sumatera segera menyiapkan lahannya, dan untuk tahap pertama diharapkan ide pembangunan jalur kereta api Sumatera ini bisa bersamaan dengan *groundbreaking* empat ruas tol trans Sumatera," tegasnya. ■

Dalam perpres juga disebutkan jangka waktu PT Hutama Karya menyelesaikan empat ruas tol trans Sumatera.

Sebelumnya, Tol Trans Sumatera direncanakan pembangunannya hingga 2025, terdiri atas 23 ruas yang melewati sembilan provinsi sepanjang 2.628 kilometer (km). Dengan rincian, koridor utama sepanjang 1.833 km dan koridor pendukung 795 km serta ruas Batu Ampar-Maka Kuning dan Bandara Hang Nadim sepanjang 25 km.

Dilain sisi, Menteri BUMN, mengatakan penunjukan PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan empat ruas proyek trans Sumatera karena proyek tersebut tidak feasible dan kurang menguntungkan swasta sehingga butuh peninjauan dan intervensi BUMN.

Pemerintah menyetujui PT. Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan TOL Sumatera, Presiden menyetujui tentang pembangunan empat ruas jalan TOL Trans Sumatera

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #PelaksanaanProyek #RKP(RencanaKegiatanPemerintah)